

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

DIAN IRMA DIANI
13009/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)

Nama : Dian Irma Diani

NIM/BP : 13009 / 2009

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Lili Anita SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing 2

Henri Agustin SE,M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

**Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi**

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)**

Nama : Dian Irma Diani

NIM/BP : 13009/2009

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang,

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

2. Sekretaris : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

3. Anggota : Nelvirita, SE, M.Si, Ak

4. Anggota : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

ABSTRAK

Dian Irma Diani (2009/13009). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2013.

**Pembimbing I : Lili Anita SE, M.Si, Ak
Pembimbing II : Henri Agustin SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,607 > 2,013$ ($sig\ 0,001 < 0,05$) yang berarti H_1 diterima. (2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,284 < 0,2013$ ($sig\ 0,778 > 0,05$) yang berarti H_2 ditolak. (3) Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,635 > 2,013$ ($sig\ 0,011 < 0,05$) yang berarti H_3 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. (2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Pariaman atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepustakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Kakak beserta Adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2009 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS | |
| A. Kajian Teori | 12 |
| 1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 12 |
| a. Pengertian Laporan Keuangan | 12 |
| b. Tujuan Laporan Keuangan | 12 |
| c. Komponen Laporan Keuangan | 15 |
| d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan | 15 |
| 2. Pemahaman Akuntansi | 21 |
| a. Pengertian Akuntansi | 21 |
| b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik | 21 |
| c. Pemahaman Akuntansi | 22 |
| 3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah | 25 |
| a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah | 25 |
| b. Informasi Keuangan Daerah | 26 |
| c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan | |
| Daerah (SIKD) | 28 |

| | |
|---|----|
| d. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan Daerah | 30 |
| 4. Peran Internal Audit | 31 |
| a. Pengertian | 31 |
| b. Peran Internal Audit Pemerintah | 33 |
| 5. Penelitian Terdahulu | 39 |
| B. Hubungan Antar Variabel | 40 |
| C. Kerangka Konseptual | 43 |
| D. Hipotesis | 46 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian | 47 |
| B. Populasi Dan Sampel | 47 |
| C. Jenis Dan Sumber Data | 49 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 49 |
| E. Variabel Penelitian | 50 |
| F. Pengukuran Variabel..... | 50 |
| G. Instrumen Penelitian | 51 |
| H. Uji Validitas Dan Reliabilitas | 52 |
| I. Hasil Uji Coba Instrumen | 54 |
| J. Uji Asumsi Klasik | 55 |
| K. Teknik Analisis Data | 56 |
| L. Definisi Operasional | 60 |

BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 62 |
| B. Demografi Responden | 63 |
| C. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas | 75 |
| D. Hasil Uji Asumsi Klasik | 76 |
| E. Hasil Penelitian | 79 |
| F. Pembahasan | 85 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Keterbatasan | 92 |
| C. Saran | 93 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang | 48 |
| 2. Skala Pengukuran..... | 51 |
| 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian | 51 |
| 4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation..... | 54 |
| 5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner | 62 |
| 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.... | 63 |
| 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian Yang Ditempuh | 64 |
| 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 65 |
| 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja..... | 65 |
| 10. Statistik Deskriptif | 66 |
| 11. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Akuntansi | 68 |
| 12. Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah | 69 |
| 13. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Internal Audit | 71 |
| 14. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah | 73 |
| 15. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian | 75 |
| 16. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian..... | 76 |
| 17. Uji Normalitas | 77 |
| 18. Uji Multikolinearitas | 78 |
| 19. Uji Heteroskedastisitas | 79 |
| 20. Koefisien Determinasi (R^2) | 80 |
| 21. Koefisien Regresi Berganda | 81 |
| 22. Uji F Statistik | 83 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|------------------------------|----------------|
| 1. Kerangka Konseptual | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Kuesioner Penelitian | 98 |
| 2. Tabulasi Data Pilot Test..... | 105 |
| 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test | 109 |
| 4. Tabulasi Data Penelitian | 114 |
| 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian | 120 |
| 6. Uji Asumsi Klasik | 125 |
| 7. Analisis Regresi Berganda | 126 |
| 8. Uji F dan Uji t | 127 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2006). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputuan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit kepemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Yuliani (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Bastian (2010: 318) bahwa tahapan proses akuntansi meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat (*posting*) dan penerbitan laporan dan catatannya.

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan

sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009) pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tupoksi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya.

Selain pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Saat ini SKPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan SIKD dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas (Ahmad, 2008:428).

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan dan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah perlu dilakukan perubahan dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dengan perubahan peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah

sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraaan SIKD, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 timbul kewajiban pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan dalam APBD dan juga laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat memberikan *keynote speech* pada lokalkarya Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Menurut *Institute Of Internal Auditor* (1999) dalam Yuliani (2010) disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Dalam melakukan review atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Inspektorat berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan masing-masing SKPD mulai dari sistem pencatatannya sampai pada pelaporan keuangannya. Dari pemeriksaan ini, inspektorat akan memberikan masukan untuk koreksi bagi instansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki keandalan informasi dan sesuai dengan SAP.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar sudah menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semester II 2011 untuk 9 kabupaten/kota di Sumbar. Namun sejauh ini, belum satupun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semua daerah itu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), masing-masing Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, kota bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh (www.padangmedia.com)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009, 2010 dan 2011, untuk tiga tahun berturut-turut tersebut Pemerintah Kota Pariaman, BPK RI Perwakilan Sumbar memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti adanya penurunan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2008, dimana Pemerintah Kota Pariaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain adanya inventarisasi aset seperti masalah tanah, persediaan barang dan aset yang belum adanya penilaian atas umur piutang, selanjutnya belum diterapkannya metode ekuitas dalam penyertaan modal pada perusahaan, masih banyaknya perjalanan dinas fiktif, keterlambatan penyetoran pajak, dll (www.antarasumbar.com). Bahkan pada tahun 2011 terungkapnya kasus korupsi atas pengadaan tanah untuk fasilitas olahraga yang

melibatkan Walikota Pariaman, mantan Walikota Pariaman dan mantan Kabag Tata Pemerintahan Pariaman yang mengakibatkan kerugian negara 1,3 Milyar, ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan keuangan daerah di Pemerintah Kota Pariaman (www.padangekspres.com).

Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan penelitian Yuliani (2010) pada pemerintahan kota Banda Aceh bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011), yang meneliti mengenai penerapan sistem informasi keuangan daerah pada instansi pemerintah Kota Padang, dia menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Roviyantie (2011) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang kepada variabel kualitas laporan keuangan. Adapun beda dari penelitian

sebelumnya yaitu dalam hal teknik pengambilan sampel dan tempat penelitian. Dimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliani (2010) pada Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitiannya menggunakan teknik *purposive sampling* dalam teknik pengambilan sampelnya sedangkan pada penelitian ini menggunakan *total sampling*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul “**Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Sejauhmana pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Sejauhmana peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kota Pariaman, dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Akademisi, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Nordiawan, 2007:151).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan Bastian (2010:297) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Menurut standar internasional akuntansi sektor publik (*International Public Sector Accounting Standards- IPSAS*) dalam Nordiawan (2007: 152) menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan infomasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat.

6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts Figures*)

Laproan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organsasi secara lebih dalam.

c. Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2) Laporan Posisi Keuangan

Menyajikan asset, utang dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3) Laporan Arus Kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 laporan diatas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai dan lainnya.

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010 :KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan

adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Soewardjono (2005) merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketetapan penyimbolan (*representasional faithfullness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah keterbandingan (*comparability*), ketaatasasan atau konsistensi (*consistency*) dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Sedangkan menurut Hongren, Harrison, Robinson dan secokusumo dalam bukunya “Akuntansi di Indonesia” yang diterjemahkan oleh Maudy Warouw (1998: 609) menyatakan bahwa agar dapat digunakan dalam pembuatan

keputusan, informasi akuntansi tersebut haruslah relevan, dapat diandalkan dan dapat diperbandingkan.

Jonas dan Blanchet (2000), menambahkan bahwa informasi keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (*clarity*) dalam arti dapat dimengerti dan dipahami yaitu apakah informasi keuangan jelas, padat, rinkas, dan memadai. Demikian juga dengan informasi yang memiliki nilai prediksi tergantung kepada bagaimana informasi tersebut dapat menyajikan pendapatan yang tidak normal atau tidak biasa dengan diharapkan secara tepat dapat ditaksir pada periode berikutnya. Penyajian informasi keuangan seperti itu disebut sebagai *earning persistence*. Selain itu nilai prrediktif informasi keuangan juga tergantung bagaimana informasi tersebut dapat digolongkan sesuai bisnis perusahaan, sehingga investor dapat mengetahui prospek perusahaan bersangkutan. Selanjutnya informasi keuangan tersebut tergantung pada kelengkapannya.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK Tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP Nomor 71 Tahun 2010:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

- b) Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hendriksen (2000) menyatakan ketetapan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketetapan waktu informasi akuntansi menurut Hendriksen (1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil

keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas merupakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Pemahaman Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Nordiawan (2007: 1) Menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut glyn (1993) dalam mardiasmo (2002:14) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*Management Control*)

2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*Accountability*).

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

c. Pemahaman Akuntansi

Menurut Jorge (*wordpress.com*) pemahaman adalah proses dari awal sampai selesai dari usaha memperoleh hasil makna tersebut. Dimulai dari interaksi antara seseorang dengan objek yang dikaji : mulai dari objek itu ditangkap oleh panca indera, kemudian disalurkan ke dalam otak, dipikirkan, dipertanyakan, diolah sampai dikeluarkan hasil olahannya menjadi makna. Pemahaman merupakan suatu proses panjang dan bersifat individual. Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya.

Pemahaman terbagi menjadi dua tipe: “tekstual” dan “kontekstual”. Yang pertama berusaha memahami teks dengan tujuan mengambil makna asalnya.

Artinya menafsirkan apa yang ada pada ruang lingkup teks itu sendiri. Sedangkan yang kedua memahami teks dengan menfokuskan diri pada luar teks. Artinya berupaya menangkap sejarah masa lalu. Kalau yang pertama menitikberatkan pada fungsi teks pada masa lampau semata, sementara yang kedua cakupannya lebih luas karena tidak hanya menyangkut soal fungsi teks itu sendiri tetapi berusaha untuk menjelaskan sejarah yang terjadi pada masa lampau. Baik itu keadaan sosial, budaya atau psikis masyarakat.

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) dalam Yuliani (2010) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Yuliani (2010) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun proses/siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2010: 318) adalah sebagai berikut:

1) Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain.

Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2) Analisis bukti transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3) Mencatat Data Transaksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (*Posting*)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan *posting*.

5) Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan

keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan kepuasan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2000). Sistem informasi berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data, baik yang dilakukan secara manual maupun dengan bantuan *computer* untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu bentuk dari sistem informasi yang spesifik adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah

“suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah”.

SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini menfokuskan peranan SIKD terhadap organisasi pemerintahan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana SIKD tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya (Jogiyanto, dalam Fikri).

b. Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah. Informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan daerah disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

- 1) APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 2) Laporan posisi keuangan
- 3) Laporan arus kas
- 4) Catatan atas laporan keuangan daerah
- 5) Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- 6) Laporan keuangan perusahaan daerah, dan
- 7) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Informasi keuangan daerah tentang laporan realisasi APBD, laporan posisi keuangan daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah, disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman pada standar

akuntansi pemerintahan yang berlaku. Informasi keuangan yang terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan disampaikan oleh pemerintah daerah yang menerimanya. Keuangan daerah berupa laporan keuangan daerah adalah ringkasan neraca dan laporan laba rugi perusahaan daerah.

Informasi keuangan daerah kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Informasi keuangan daerah juga disampaikan kepada menteri teknis terkait sesuai kebutuhan. Penyampaian informasi keuangan daerah disampaikan melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah adalah :

1. Paling lambat tanggal 31 januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah diterapkannya perubahan APBD tahun berjalan.
2. Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
3. Paling lambat tanggal 31 agustus tahun berjalan untuk laporan realisasi APBD, laporan posisi keuangan daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah tahun yang lalu.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah diterapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

desentralisasi. Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) meliputi:

- 1) Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah
- 3) Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan:

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
- 2) Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
- 3) Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran, dan

- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan standar informasi keuangan daerah
- 2) Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD,
- 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD
- 6) Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan
- 7) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan:

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah,
- 3) Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
- 4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah
- 5) Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat

- 6) Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Ahmad (2002) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan SIKD secara nasional dalam menyampaikan informasi keuangan, perlu adanya pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap proses pengelolaan APBD maupun APBN.

d. Pemanfaataan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Davis (1989) dan Adam *et.al* (1992) mendefenisikan kemanfaatan (*usefulness*) sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi orang tersebut. Pengukuran kemanfaatan tersebut berdasarkan frekuensi dan diversitas teknologi yang digunakan. Sedangkan menurut Chin dan Todd (1995) kemanfaatan dapat berupa kemanfaatan suatu faktor seperti pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktifitas, efektivitas, dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Pemanfaataan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemanfaatan suatu teknologi sistem informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut (Meuthia, 2008) dalam Gusforni (2011):

1. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna
2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna
3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

Dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi meliputi (Arief: 2008) dalam Gusforni (2011):

- a. Mempertinggi efektivitas
- b. Menjawab kebutuhan informasi
- c. Meningkatkan kinerja
- d. Meningkatkan efisiensi

4. Peran Internal Audit

a. Pengertian

The Institute of Internal Auditor (1999) dalam Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Menurut Sawyer (2005:10) mendefenisikan audit internal sebagai sebuah penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi, untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (2) risiko yang

dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (5) sumber daya telah digunakan secara efesien dan ekonomis, (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Kegiatan audit internal haruslah membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang terus menerus (Sawyer, 2005:55).

Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah yang berada di bawah bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

b. Peran Internal Audit Pemerintah (Inspektorat)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang

dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi Inspektorat adalah:

- 1) Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 2) Menentukan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
- 3) Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengeidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- 4) Mereview sistem yang digunakan untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
- 5) Mereview alat-alat yang digunakan untuk mangamankan kekayaan daerah dan menverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
- 6) Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.

- 7) Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 8) Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
- 9) Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Dalam melaksanakan review atas laporan keuangan, aparat pengawas intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk dan catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Ruang lingkup review adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan kementerian Negara/lembaga yang berangkutan. Sasaran review adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

a. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

b. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur Dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

a. Melakukan Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi

Pengawasan intern dilakukan oleh inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a) Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggara pemerintah daerah
- b) Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggara pemerintah daerah.

- 2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a) Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkahnya untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
- b) ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelola keuangan daerah.

- 3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan SPI atas pengelola keuangan daerah oleh SKPD

- b) Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
 - c) Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 4) Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
- a) Dilaksanakannya pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.
 - b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.
- b. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**
- Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran inspektorat selaku internal audit pemerintah lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, indikator kinerja inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern antara lain:
- a) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
 - b) Sosialisasi SPIP

- c) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview. Entitas wajib menindaklanjuti hasil review dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan intern. Dalam hal entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode terkait atau kelalaian, maka aparat pengawasan intern dapat menerbitkan pernyataan telah direview dengan paragraf penjelas yang mengungkapkan mengenai penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah dan peraturan terkait lainnya.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) menyatakan bahwa, pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah kota Banda Aceh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011), yang meneliti mengenai Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang, dia menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Yenita (2010) meneliti mengenai pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan dan peran inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD. Sampel penelitian ini SKPD di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pejabat penatausahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan dan peran inspektorat mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena kurangnya pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang belum optimal dan masih kurangnya peran internal audit dalam pemerintahan.

B. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Poerwadarminta:2006).

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009) pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan

harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tumpoksi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya.

Yuliani (2010) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Banda Aceh, dia menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

b. Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. dalam kerangka ini, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini menfokuskan

peranan/pemanfaatan SIKD terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana SIKD tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, apa yang dimaksud kesuksesan dari sistem informasi tersebut dan bagaimana membuat sistem informasi tersebut menjadi sukses (jogiyanto, dalam fikri)

Astuti (2012) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat apabila masing-masing SKPD memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menduga bahwa pemanfaatan sistem infomasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Hubungan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Yenita (2010) telah melakukan penelitian pada instansi pemerintah daerah kota padang, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi dipengaruhi oleh inspektorat sebagai internal audit. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menduga bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan adanya peran internal audit pada Pemerintah Kota Pariaman.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu

berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

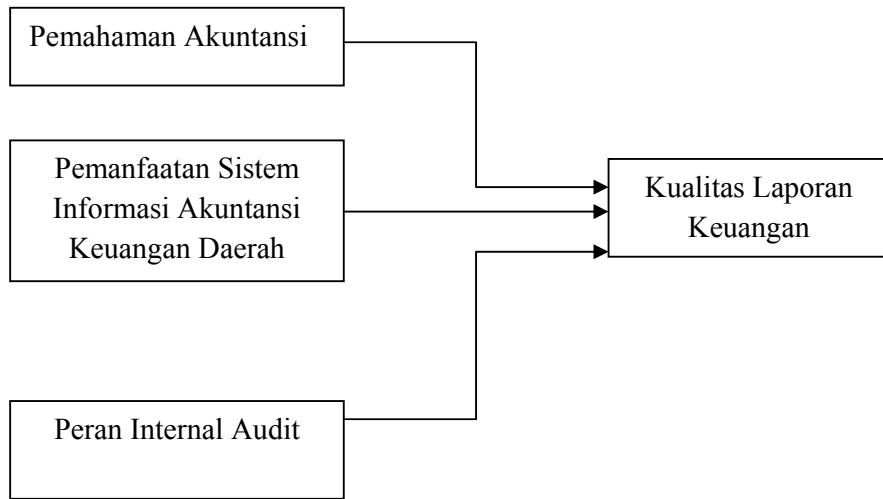
Pemahaman akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Untuk penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas sistem informasi berjalan dengan baik,

maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi. Adanya peran internal audit/ inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Dalam hal ini peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

H₁ : Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman

H₂ : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman

H₃ : Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “ adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman (H_1 diterima).
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman (H_2 ditolak).
3. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman (H_3 diterima).

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di kota Pariaman sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 42,4%.

Sedangkan 57,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti penerapan Standar akuntansi pemerintahan (SAP), pengalaman kerja, pengawasan intern sebagai variabel independennya, yang akan berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, Tidak hanya meneliti di satu tempat saja, misalnya Satuan Kerja Perangkat

Daerah Se-Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Astuti. 2012. *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)*. Skripsi. FE UNP
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga
- Fikri, Miftahul. 2011. *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. UNP
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamdani, Sugita. 2011. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Pemerintahan Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia
- Harifan, Handiko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Jaksa Teliti Berkas Wako Pariaman. Melalui <http://www.padangekspres.com> [13/03/2013]
- James, A. Hall. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Jones, Gregory. Jeanot, Blanchet. 2000. *Assessing Quality Of Financial Reporting, Accounting Horizons*, Vol 14. Nomor 3.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Wajar Dengan Pengecualian. Melalui <http://www.antarasumbar.com> [13/03/13]
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi